

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Cheetah Project (2022-2024) bukan sekadar sebuah kebijakan pemulihan ekologis yang netral. Sebaliknya, megaprojek ini merupakan manifestasi nyata dari environmentalism manajerial yang bersifat pragmatis antroposentris, di mana negara memosisikan dirinya sebagai aktor absolut yang memanipulasi entitas non-manusia demi mencapai legitimasi politik domestik dan memperkuat national branding di panggung internasional. Melalui kacamata kritis Green Theory, Pemerintah India terbukti menempatkan citah Afrika di bawah kontrol birokrasi dan linimasa politik penguasa yang mengorbankan kesejahteraan serta batasan biologis satwa itu sendiri. Penelitian ini secara khusus menegaskan fokus analisisnya pada konsep komodifikasi satwa sebagai poros utama untuk mendekonstruksi Cheetah Project.

Di tingkat domestik, komodifikasi simbolik ini terlihat dari dramatisasi peresmian proyek yang dipaksakan bertepatan dengan hari ulang tahun Perdana Menteri Narendra Modi, meskipun satwa sedang berada dalam fase biologis winter coat yang tidak sesuai dengan musim muson India yang lembab. Sementara di tingkat transnasional, citah Afrika direduksi nilainya menjadi aset diplomatik dan alat tukar politik luar negeri yang transaksional, yang diikat melalui mekanisme side-payments berupa bantuan teknologi program ITEC senilai \$12,16 juta kepada Namibia serta pembentukan International Big Cat Alliance (IBCA) demi mendongkrak *bargaining power* India sebagai pemimpin lingkungan global.

Dominasi logika komodifikasi citah Afrika ini pada akhirnya menciptakan disonansi etis dan ketimpangan hukum terhadap prioritas konservasi domestik India. Atas nama pemenuhan hasrat teatrikal kekuasaan negara (statism), pemerintah secara sistematis menunda perintah hukum Mahkamah Agung tahun 2013 terkait relokasi Singa Asia di Gir yang secara biologis jauh lebih

terancam punah. Fakta ketiadaan Cheetah Project dalam dokumen National Wildlife Action Plan 2017-2031 semakin mengonfirmasi adanya policy overdrive manipulatif yang mengedepankan nilai visual satwa asing daripada pemulihan habitat murni karnivora endemik lokal. Pada tingkat tapak, panggung komodifikasi berskala global ini menuntut konsekuensi sosio spasial yang opresif melalui praktik *fortress conservation* dan *green grabbing*. Negara melakukan teritorialisasi ulang secara sepihak dengan merampas hak-hak agraria historis dan menjauhkan ruang hidup komunal etnis Sahariya dari kawasan Taman Nasional Kuno. Guna meredam resistensi, negara memproduksi tameng moral ekologis lewat siaran radio populis Mann Ki Baat serta membentuk program sukarelawan Cheetah Mitras. Program ini nyatanya menjadi model partisipasi publik semu yang tidak memberikan desentralisasi kekuasaan kepada masyarakat sipil, melainkan memperlak mereka sebagai perpanjangan tangan birokrasi untuk mengamankan aset diplomatik negara.

Akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Cheetah Project bertindak sebagai proyek pendudukan ekologis yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan. Melalui integrasi ketiga konsep utama dengan komodifikasi sebagai porosnya, proyek ini menegaskan sebuah realitas politik internasional kontemporer: bahwa nilai suatu spesies di mata negara modern tidak lagi ditentukan oleh peran ekologis aslinya di alam liar, melainkan oleh sejauh mana eksistensi mereka dapat dikonstruksikan secara sosial-politik menjadi modal pencitraan demi kelangsungan kekuasaan rezim yang berkuasa.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini secara eksplisit memposisikan Green Theory sebagai landasan kritis utama untuk membedah urgensi ekologis di balik Cheetah Project, yang dalam temuan ini teridentifikasi lebih dalam sebagai instrument atau alat politik konservasi Pemerintah India daripada sebuah upaya pelestarian satwa dilindungi yang mengedepankan kesejahteraan satwa. Melalui tiga pilar kritik struktural Green Theory (Kritik *Statism*, *Knowledge Diplomacy*, dan *Fortress Conservation*), penulis mampu mengupas, penulis mampu mengupas berbagai

spektrum dan dimensi kebijakan yang menunjukkan adanya ketidak cocokan antara narasi penyelamatan biodiversitas dengan realitas di lapangan, di mana kepentingan politik dan citra nasional tampak lebih mendominasi di atas nilai-nilai ekologis intrinsik. Diperuntukkan peneliti di masa depan yang tertarik untuk memperdalam kajian mengenai isu diplomasi konservasi, diplomasi satwa, maupun cheetah project itu sendiri disarankan untuk bisa mencoba mengintegrasikan perspektif yang jauh lebih beragam. Melalui perluasan kerangka teoritis tersebut, diharapkan pemahaman mengenai dinamika diplomasi satwa dan politik ekologis dalam studi Hubungan Internasional dapat lebih mendalam dan multidimensional.

6.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, peneliti telah melakukan analisis terkait bagaimana Pemerintah India menjadikan cheetah project sebagai sebuah instrument untuk meluncurkan tujuan politik konservasi cheetahnya di tahun 2022-2024. Meskipun demikian, penulis menyadari adanya limitasi dalam penelitian ini, khususnya terkait dominasi perspektif dari sisi pengamat kritis sebagai narasumber utama. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan subjek penelitian dengan mengintegrasikan sudut pandang dari pihak pemerintah maupun aktor-aktor yang memandang proyek ini memiliki nilai ekologis positif. Hal ini diperlukan guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan multidimensional, sehingga perdebatan mengenai efektivitas serta etika dalam politik lingkungan global dapat dipetakan secara lebih berimbang.